



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

Deli Bunga Saravistha, Aden Sutiapermana, Hardi Fardiansyah, Andhika Djalu Sembada, Dwi Riyanti & Rianda Usmi, Daelami Ahmad, Sumario, Evi Susilawati, Siti Fathimah, Eva Pasaribu, Ricky Santoso Muharam, Fatkhul Muin, Vina Dini Pravita, Fitriani.

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-078-4

Cetakan Pertama:

Mei, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Makna dan Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan	3
C. Patriotisme, Nasionalisme, Geopolitik dalam Pendidikan Kewarganegaraan	5
D. Meningkatkan Ketahanan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	9
E. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Bagi Intra dan Antar Generasi	11
F. Rangkuman Materi	15
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	19
A. Pendahuluan	20
B. Diskursus Perkembangan Hak Asasi Manusia	21
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia	25
D. Istilah dan Definisi Hak Asasi Manusia	27
E. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia	28
F. Prinsip Hak Asasi Manusia	29
G. Macam-Macam HAM	31
H. Pelanggaran HAM	32
I. Landasan Hukum dan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia	33
J. Teori Hak Asasi Manusia	34
K. Rangkuman Materi	35
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	39
A. Latar Belakang	40
B. Hak Warga Negara	41
C. Kewajiban Warga Negara	45
D. Rangkuman Materi	49
BAB 4 KESADARAN BELA NEGARA	53
A. Pendahuluan	54
B. Pembahasan	58

C. Bela Negara Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	59
D. Bela Negara dan Peran Media Sosial; Pencegahan Konflik dan Penanganan Potensi Konflik	61
E. Bela Negara Dalam Berbagai Cara	69
F. Rangkuman Materi	59
BAB 5 KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA	73
A. Pendahuluan	74
B. Sejarah Demokrasi	75
C. Pengertian Demokrasi	77
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	79
E. Nilai Demokrasi	82
F. Bentuk-Bentuk Demokrasi	83
G. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia	85
H. Rangkuman Materi	93
BAB 6 NEGARA DAN KONSTITUSI	99
A. Pendahuluan	100
B. Konstitusi	101
C. Negara	110
D. Rangkuman Materi	118
BAB 7 GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA	123
A. Pendahuluan	124
B. Definisi dan Kedudukan Wawasan Nusantara	125
C. Hakikat Wawasan Nusantara	128
D. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	129
E. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	133
F. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia	135
G. Study Kasus (Potret Perbatasan Tinggal di Indonesia Menggantungkan Hidup dengan Indonesia)	140
H. Rangkuman Materi	142
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	145
A. Pendahuluan	146
B. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	147
C. Landasan Hukum, Prinsip, dan Sifat Ketahanan Nasional Indonesia	149

D. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia	151
E. Ketahanan Nasional Indonesia dan Astragatra	151
F. Korelasi Antar Gatra	155
G. Ketahanan Nasional di Era Society 5.0	157
H. Rangkuman Materi	160
BAB 9 INTEGRASI NASIONAL	165
A. Pendahuluan	166
B. Pengertian Integrasi Nasional	167
C. Proses Terbentuknya Integrasi Nasional	169
D. Jenis-Jenis Integrasi Nasional	175
E. Urgensi dan Tantangan Integrasi Nasional Bagi Keberlangsungan Kesatuan Bangsa Indonesia	177
F. Rangkuman Materi	181
BAB 10 IDENTITAS NASIONAL	185
A. Pendahuluan	186
B. Pengertian dan Identitas Nasional	187
C. Faktor-Faktor Pendukung Penegakan Identitas Nasional	191
D. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Identitas Nasional	192
E. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional	196
F. Rangkuman Materi	198
BAB 11 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	203
A. Pendahuluan	204
B. Pengertian Politik	205
C. Sistem Politik	206
D. Struktur Politik	207
E. Komunikasi Politik	209
F. Budaya Politik	209
G. Strategi Nasional	211
H. Rangkuman Materi	212
BAB 12 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	215
A. Pendahuluan	216
B. Sejarah Perkembangan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia	219
C. Paradigma Pembagian Urusan Dalam Otonomi Daerah	221
D. Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	225
E. Rangkuman Materi	228

BAB 13 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Prinsip-Prinsip Pokok Good & Clean Government	234
C. Good and Clean Government Sebagai Kontrol Sosial	239
D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.....	240
E. Manfaat Adanya Good and Clean Government	241
F. Hambatan Dalam Penerapan Good and Clean Government	243
G. Rangkuman Materi	245
BAB 14 IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER	249
A. Pendahuluan.....	250
B. Rincian Pembahasan Materi.....	251
C. Identitas Nasional.....	252
D. Hakikat Identitas Nasional.....	255
E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional	256
F. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	258
G. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	259
H. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Suatu Bangsa	262
I. Identitas Nasional di Indonesia	263
J. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia	267
K. Rangkuman Materi	268
GLOSARIUM	272
PROFIL PENULIS	282



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 4: KESADARAN BELA NEGARA

Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 4

KESADARAN BELA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Kesadaran bela negara merupakan bagian penting dalam kebijakan nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi banyak sekali ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui usaha panjang dan penuh pengorbanan, tidak bisa begitu saja dilepaskan dari kontribusi dan sumbangsih yang diberikan oleh seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengupayakan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional, guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan harapan bangsa Indonesia yang seutuhnya, diharapkan suatu kebijakan nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan yang strategis, baik dalam tataran global, regional, juga nasional.

Setiap negara perlu mempunyai kebijakan strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tidak hanya dapat memiliki pengaruh positif berupa peluang, tetapi juga bisa berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang nantinya memiliki potensi menjadi sebuah konflik bagi

negara Indonesia. Itulah sebabnya, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan-persoalan atau ancaman integritas, identitas, serta keutuhan NKRI (Suhirwan dan Kunto Wibowo, 2020). Merespon tantangan bela negara ke depan, diperlukan sebuah metode dan strategi yang terpadu serta mensinergikan antara lapisan pertahanan militer dengan lapis pertahanan nonmiliter. Strategi pertahanan berlapis yang memadukan antara lapisan pertahanan militer dengan lapisan pertahanan nonmiliter, adalah manifestasi berdasarkan keikutsertaan seluruh rakyat negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara menggunakan pendayagunaan segenap sumber daya nasional secara maksimal.

Hal yang menjadi pertimbangan awal dan penting dari pertahanan negara yang bersifat menyeluruh tersebut adalah diperlukannya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dari semua lapisan masyarakat. Kesadaran bela negara telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Penjelasan lebih lanjut tentang upaya pembelaan negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang menyebutkan bahwa bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara yang dimiliki sejak lahir, melainkan berupa proses yang terbentuk dari berbagai macam hal. Seperti lingkungan, pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Pembinaan kesadaran bela negara dirasa perlu untuk lebih dibiasakan dan diupayakan sejak dini serta senantiasa dikembangkan dan diresapi secara berkesinambungan. Penjelasan mengenai pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk membangun karakter masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotis serta memiliki ketahanan diri yang tangguh guna

menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hakikat tersebut, terdapat tiga pertanyaan mendasar yang terkait dengan bela negara yang dirasa perlu dijawab agar dapat lebih memahami makna dari kesadaran bela negara itu sendiri. Pertama, "Dari sebuah negara, apa yang harus dibela?". UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela dari sebuah negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara itu sendiri. Kedua: "Mengapa kita harus melindungi negara kita?" Setiap negara biasanya memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan pula terdapat konflik antar negara. Kondisi seperti ini sangat penting bagi suatu negara untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, meskipun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa itu akan bertahan selamanya. Oleh sebab itu, agar dapat bertahan hidup, bangsa perlu dilindungi dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Ketiga: "Siapa yang bertugas melindungi negara?" Upaya untuk membela negara tidak bisa sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat kepolisian saja. Sebagaimana sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh, konsep bela negara harus melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk yang ada di dalamnya seperti, warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Diperlukan Pembinaan terhadap kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, agar dapat terselenggaranya sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh.

Pembinaan terhadap kesadaran bela negara merupakan salah satu upaya untuk membangun kesadaran bersama yang sangat penting dilaksanakan guna memperkokoh pertahanan NKRI dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan seluruh bangsa dan negara. Pada dasarnya Pembinaan terhadap kesadaran bela negara ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap, mental serta karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran

berbangsa dan bernegara, yakin sepenuhnya pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemauan yang besar dalam hal bela negara, baik secara psikis maupun fisik. Warga negara Indonesia diharapkan memiliki kesadaran bela negara yang bersifat menyeluruh, yang memiliki tujuan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Sejalan dengan konsep kesadaran bela negara, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas diri melalui program bela negara. Program ini memiliki tujuan dan maksud untuk menyiapkan sumber daya manusia, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan dalam sistem pertahanan negara. Keikutsertaan dan keterlibatan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dijiwai atas dasar kecintaan terhadap negara dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pemenuhan atas hak dan kewajiban tersebut ditujukan untuk membentuk suatu kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pada perkembangan selanjutnya nilai-nilai pendidikan terkait kesadaran bela negara dapat diintegrasikan dalam sebuah kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah. Nilai-nilai kesadaran bela negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh masyarakat, sebagai upaya dalam memperkuat militansi sekaligus untuk membangun ketahanan bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman yang bersifat kompleks guna mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Kesadaran bela negara dirasa perlu lebih ditanamkan lagi bagi para generasi muda saat ini. Pengaruh media sosial dan informasi yang sangat cepat masuk ke dalam lingkungan para generasi muda, menjadi cukup berisiko jika tidak dibekali dengan nilai-nilai bela negara. Berita-berita penyimpangan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa yang setiap hari menghiasi, dikhawatirkan dapat melunturkan dan melemahkan rasa nasionalisme serta menurunkan kesadaran bela negara.

Setiap bangsa tentu saja mendambakan kehidupan yang nyaman, aman, tentram dan damai, namun tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut (Kartono dan Susi Dyah Fatmawati, 2009). Negara tidak akan mampu bertahan dalam mempertahankan eksistensinya tanpa peran serta atau dukungan yang berasal dari kontribusi warga negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, secara ideal peraturan-peraturan yang mengatur tentang bela negara tidak banyak mengalami hambatan dalam proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sinergitas diperlukan agar dapat mewujudkan kesadaran bela negara yang bersifat menyeluruh dan terstruktur. Peran serta seluruh lapisan masyarakat diperlukan guna mencapai tujuan utama dalam pertahanan negara, yakni menjaga keutuhan NKRI dari segala macam bentuk ancaman yang datang, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam.

B. PEMBAHASAN

Ancaman terhadap negara semakin besar dan rumit. Jika di masa lalu ancaman itu muncul secara fisik dalam bentuk invasi oleh pihak asing, maka untuk masa yang sekarang ini sumber ancamannya tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Bentuk dan karakteristik musuh sebagai wujud dari ancaman, metodenya mengalami perubahan. Segala macam upaya dilakukan agar tujuan dari ancaman tersebut dapat terwujud. Bahkan tidak sedikit pula, orang dalam pun ikut terlibat dalam upaya melancarkan ancaman tersebut. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadi incaran berbagai kepentingan asing. Hakikat pertahanan negara adalah memaksimalkan kepentingan rakyat dan melindungi kekayaannya. Sikap pertahanan yang seperti ini mau tidak mau bersinggungan langsung ke dalam konteks kesadaran bela negara. Ancaman yang muncul terkadang cirinya tidak mudah dikenali, sehingga diperlukan kesadaran, kemampuan dan kecakapan yang lebih baik dari sebelumnya. Bentuk dari ancaman yang saat ini muncul biasanya berupa aksi terorisme, media sosial, dan serangan budaya. Generasi muda Indonesia diharapkan memiliki kecerdasan, keterampilan dan kepribadian yang sesuai agar dapat mendorong lahirnya kesadaran bela negara.

C. BELA NEGARA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Generasi muda Indonesia perlu memahami bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, merupakan suatu peristiwa yang memiliki makna yang sangat dalam. Urutan dari berbagai macam peristiwa dalam upaya mempertahankan wilayah dari invasi negara asing, terekam jelas dalam sejarah perjuangan bangsa. Kesadaran untuk mempertahankan wilayahnya dari serbuan negara asing, telah dilakukan sejak ketika pertama kali negara asing tersebut datang ke Indonesia untuk kemudian berusaha menguasai bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat, berbagai macam upaya dilakukan oleh para pejuang dalam rangka untuk mewujudkan negara yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia begitu jelas adanya. Salah satu diantaranya adalah ketika para pemimpin kita ditangkap kemudian diasingkan ke daerah lain, harapannya agar upaya tersebut dapat membuat pergerakan perjuangan kemerdekaan menjadi turun. Namun apakah dengan upaya tersebut dapat menurunkan semangat perjuangan dari para pejuang? Inti dari sebuah negara adalah rakyat. Semangat dan kesadaran bela negara tidak hanya dimiliki atau dilakukan oleh para pemimpin saja, melainkan juga dapat dimiliki dan dilakukan oleh seluruh rakyat. Begitu banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh rakyat, yang sifatnya merupakan inisiatif dari masing-masing rakyat Indonesia. Hal ini tentunya merupakan sebuah tindakan yang positif dan dapat membentuk rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga dapat menjadi sebuah identitas nasional.

Proses terbentuknya identitas nasional terdapat dalam upaya yang dilakukan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Di tengah-tengah perlakuan ketidakadilan yang dirasakan, rakyat Indonesia melakukan gerakan-gerakan untuk dapat meraih kemerdekaan. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi dasar utama dalam kesadaran bela negara. Salah satu contohnya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai perwujudan atas perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertanah air satu, berbangsa satu menjunjung tinggi bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Melalui semangat dan nilai-nilai kebangsaan tersebut, akhirnya

bangsa Indonesia berhasil mewujudkan sebuah negara melalui proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Perkembangan yang selanjutnya mengenai keutuhan wilayah negara yang diperjuangkan menggunakan Deklarasi Juanda dalam tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya diakui oleh United Nations Convention of Law on the Sea (UNCLOS) menjadi negara kepulauan pada tahun 1982. Bangsa yang baru terbentuk, idealnya mempunyai acuan atau pedoman dalam menjalankan sistem kenegaraan serta dalam mewujudkan cita-citanya yakni memiliki nilai-nilai yang terbentuk berdasarkan pengalaman kebangsaan. Nilai-nilai tersebut yang merupakan inti dari kekuatan bangsa untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam di tengah-tengah perubahan global. Pada dasarnya pengalaman yang dimiliki suatu bangsa merupakan sebuah dokumen kebangsaan yang berisikan tekad, hasrat serta asa yang diperjuangkan dan dapat diwujudkan dalam sebuah nilai-nilai kebangsaan dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara.

Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan berdasarkan dalam sejumlah perlawanan yang muncul dalam hal menentang imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di beberapa wilayah, diantaranya perlawanan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Sultan Baabullah, Pattimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Perlawanan yang dilakukan saat itu, dapat dikatakan cukup berpengaruh meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan, gerakan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan serta keterbatasan yang dimiliki sehingga belum mampu mengatasi kekuatan dari penjajah. Seiring dengan adanya kemunculan kaum-kaum terpelajar yang merupakan buah dari diperkenalkannya pendidikan oleh Belanda, lahirlah sebuah gerakan atau suatu upaya yang berbeda dari apa yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pergerakan perjuangan pada awal abad ke-20 dilakukan melalui sebuah organisasi yang terbentuk. Diawali dari Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. Melalui gerakan dari berbagai organisasi tersebut, muncul sebuah ide/pencerahan baru untuk lebih menyebarkan semangat dan kesadaran bela negara yang sama dalam lingkup yang lebih luas, melintasi batas-batas kedaerahan. Pergerakan tersebut tercatat dalam sejarah Indonesia dengan istilah pergerakan nasional. Kesadaran untuk membela

negara tersebut yang kemudian melahirkan semangat persatuan dan kesatuan. Semangat tersebut merupakan akumulasi dari rasa senasib yang dialami ketika berada di bawah belenggu penjajahan, sehingga sebagai konsekuensinya muncul kebangkitan atas rasa solidaritas yang tinggi (Abdul, 2021). Atas dasar tersebut, usaha perjuangan dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dapat dilakukan menggunakan 2 cara. Pertama, upaya yang dilakukan secara kooperatif, yakni menggunakan cara memanfaatkan wadah yang dibuat kolonial Belanda, misalnya melalui Volksraad. Lembaga tersebut semacam “dewan rakyat”, tetapi anggotanya tidak melalui skema pemilihan melainkan pengangkatan. Sebagai contoh adalah seorang tokoh nasional yang kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional, yaitu Muhammad Husni Thamrin yang memilih menggunakan cara seperti ini. Kedua, upaya yang dilakukan menggunakan cara non-kooperatif. Strategi ini dilakukan mereka-mereka yang non-kooperasi, yaitu dengan tidak menggunakan memakai fasilitas yang dibentuk dan diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Soekarno melalui gerakan yang dilakukan bersama Partai Nasional Indonesia yang didirikan tahun 1927 merupakan contoh dalam upaya dengan cara ini. Apapun metode dan strategi yang dilakukan, semangat persatuan dan kesadaran bela negara yang akan menjadi dasar utama suatu bangsa dalam meraih kemerdekaan.

D. BELA NEGARA DAN PERAN MEDIA SOSIAL; PENCEGAHAN KONFLIK DAN PENANGANAN POTENSI KONFLIK

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2021, jumlah pulau di Indonesia adalah kurang lebih sekitar 17.000 dan menurut rencana akan didaftarkan dalam pertemuan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) pada tahun 2022. Indonesia sebagai negara juga sangat unik karena sangat beragam, dan menurut Badan Pusat Statistik terdapat 1.340 suku bangsa dan 300 suku pada tahun 2010. Terdapat 1.211 bahasa daerah. Keberagaman yang luar biasa ini selain merupakan kekuatan, juga merupakan kelemahan yang dapat menimbulkan konflik. Salah satu solusi yang dianggap penting bagi pencegahan konflik Indonesia adalah dengan adanya semangat

kebangsaan dan kesadaran bela negara yang dimiliki semua kalangan di Indonesia. Harapannya tentu saja agar seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam giat bela negara. Melalui sejarah pergerakan perjuangan bangsa dalam mendapatkan kemerdekaan, kesadaran bela negara secara ideal dapat menjadi sebuah solusi dalam meredam sebuah konflik. Situasi konflik pada umumnya merupakan situasi yang tidak menyenangkan. Awal mula muncul sebuah konflik dimulai dengan adanya konflik-konflik terdahulu yang biasanya tidak terselesaikan, yang pada akhirnya justru menimbulkan ketegangan antar pihak, kemudian meningkat menjadi krisis dimana semua sistem sosial yang lain ikut berdampak. Konflik demi konflik terus berlanjut sehingga menimbulkan korban jiwa dan akhirnya konflik meningkat dan menjurus menjadi kekerasan yang masif. Dampak dari konflik dalam skala besar yang sangat dahsyat, misalnya seperti yang terjadi di Ambon, Poso dan Sampit. Banyak masyarakat yang menjadi korban, tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah cedera psikologis dan trauma yang berkepanjangan, kemudian efek yang lainnya seperti kemarahan, dendam, ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan setiap kali menghadapi masalah. Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa jika terjadi konflik, yang terpenting adalah upaya dalam melakukan pencegahan konflik.

Upaya dalam mencegah terjadinya konflik, tentunya kita harus mewaspadai konflik itu sendiri. Ada berbagai asumsi dasar dan pendapat ahli tentang topik konflik. Asumsi dasar yang paling berpengaruh adalah bahwa konflik selalu ada dalam kehidupan manusia. Sehingga konflik ini perlu kita kelola agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan yang masif sehingga dapat menghancurkan peradaban manusia. Di sinilah istilah manajemen sengketa muncul. Asumsi dasar ini didasarkan pada perbedaan alami antara orang dan kelompok. Mungkin terdapat perbedaan etnis, agama, ekonomi atau politik. Kontroversi muncul ketika individu atau kelompok tidak mampu mengatasi perbedaan yang ada. Dalam persengketaan, masing-masing pihak menyatakan bahwa pihaknya yang paling benar, paling suci, paling nasionalis, dan paling hebat. Di sini terjadi saling klaim yang sengit, pihaknya yang benar dan pihak lain salah. Jika berbicara perihal pencegahan konflik berarti sejak awal ketika masih

dalam bentuk persengketaan harus segera dicari solusinya sehingga sengketa itu tidak berkembang menjadi konflik, dan menjadi peperangan. Untuk mencegah konflik paling tidak pemicu konflik/api harus segera diredam, dan juga bola panas atau akselerator konflik harus segera dinetralisir, serta dalam jangka panjang seluruh permasalahan antar kelompok harus segera diselesaikan sehingga tidak memiliki potensi menjadi konflik. Pertanyaan yang muncul adalah pihak mana yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik, apakah pemerintah?, sektor swasta? atau masyarakat? Jawabannya mungkin berbeda, tetapi dalam konteks pencegahan konflik, dapat ditemukan bahwa masyarakat memiliki peran yang lebih besar untuk menjalankannya. Untuk memahami peran masyarakat, mungkin kita bisa mendekatinya dengan melihat reaksi masyarakat terhadap konflik (Malik, 2017). Pada dasarnya ada tiga jenis respon masyarakat terhadap konflik. Pertama, segera setelah konflik muncul, ia bereaksi positif, langsung menyerang, dan terlibat dalam konflik tanpa terlebih dahulu melihat masalah secara kritis. Reaksi kedua adalah ketika konflik muncul, mereka dengan cepat melarikan diri atau tetap diam dan tidak berusaha mencari solusi atau menyelesaikan konflik. Reaksi ketiga mencoba untuk menangani konflik segera setelah itu terjadi dan mencari solusi untuk konflik tersebut. Secara empiris, reaksi umum di masyarakat adalah jika mereka tidak melaksanakan atau mendinginkan, masyarakat bisa sangat aktif terlibat dalam konflik. Tidak banyak orang dapat melihat sebuah masalah secara kritis dan mencoba untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.

Upaya pencegahan konflik di Indonesia tidaklah mudah. Dalam interaksi antar individu dengan kelompok yang berbeda suku atau agama, individu atau kelompok tersebut biasanya mengambil jalan pintas dalam menilai individu atau kelompok tersebut dengan memberikan sebuah cap tertentu yang mengacu pada ciri khas yang dimiliki oleh individu lain tersebut. Kesalahpahaman atau pelabelan berdasarkan ciri-ciri tersebut merupakan stereotipe (Malik, 2017), yang merupakan cikal bakal munculnya prasangka yang berujung pada sebuah konflik. Prasangka lainnya terkait dengan sosial politik dan gender. Misalnya, orang-orang yang tinggal di tepi hutan adalah penjarah hutan, aktivis LSM selalu dianggap sebagai pembangkang, mereka yang melakukan berbagai

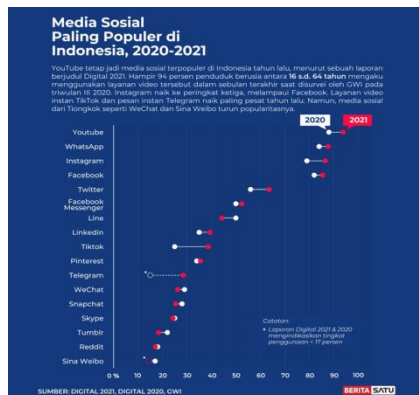
upacara keagamaan tertentu dianggap kafir, kemudian ketika berbicara tentang gender, ada kesalahpahaman bahwa perempuan cenderung lemah dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih rasional. Semua prasangka ini dapat menyebabkan terjadinya konflik. Prasangka yang tumbuh dalam masyarakat dapat menjadi berpotensi ideal bagi perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok di dalam dan di luar kelompok, atau kelompok "kami" dan "mereka". Setiap kelompok selalu memberikan nilai positif kepada kelompoknya sendiri, dan setiap kelompok selalu cenderung membandingkan kelompoknya sendiri dengan kelompok yang lain. Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya adalah yang terbaik. Semua ini harus dipahami dan disadari secara kritis agar kita dapat mencegahnya agar tidak membesar dan menjadi sumber konflik yang bisa menghancurkan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui kesadaran bela negara. Pembahasan ini sejak awal berupaya memberikan pengertian bahwa kesadaran bela negara diyakini dapat menjadi solusi untuk pencegahan konflik di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah semangat nasionalisme dan patriotisme, serta ketahanan negara yang kuat yang mendukung berdirinya negara kesatuan, yang menyatakan tentang membangun kepribadian. Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kunci kesadaran bela negara adalah memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Pendapat lain mengemukakan bahwa nasionalisme dan patriotisme adalah ibarat pedang bermata dua. Sekaligus menjadi satu kesatuan karena memiliki tujuan yang sama. Tetapi pada dasarnya mereka dapat dibedakan. Patriotisme dapat diartikan sebagai cinta tanah air dan pertumpahan darah. Nasionalisme, di sisi lain merupakan suatu keyakinan bahwa negara seseorang lebih unggul dari yang lain (Minoru Karasawa,2002). Pekerjaan rumah berikutnya adalah menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap bangsa, cinta tanah air, dan menghargai kearifan lokal. Ini adalah syarat utama untuk menyelesaikan konflik. Dilihat lebih jauh, konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda, antara lain konflik pilpres/pilkada,

konflik pertanian, konflik agama, konflik antar etnis, dan konflik masyarakat. Konflik-konflik tersebut banyak sekali diberitakan di berbagai macam media, salah satunya adalah media sosial.

Penggunaan media sosial dewasa ini semakin meningkat dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa masyarakat semakin mudah untuk mengirimkan atau menerima berita secara real time. Selain itu, tidak dapat dipungkiri ditemukan pula berbagai oknum dari elemen masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mengutarakan ujaran kebencian (*hate speech*). kemudian informasi yang tidak memiliki kebenaran (*hoax*) juga tersebar luas dengan menggunakan media sosial. *Hoax* dan *hate speech* ini justru memicu terjadinya potensi-potensi konflik yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial di lapangan secara fisik dengan tindakan yang anarkis. Diperlukan upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan media sosial itu sendiri sebagai media komunikasi yang menyejukkan dan menyadarkan seluruh elemen masyarakat sehingga terhindar dari kecenderungan berkonflik. Pasca pergerakan kebangkitan reformasi, kebebasan masyarakat yang tadinya terbatas ruang geraknya, berubah menjadi euphoria yang berlebihan sehingga memiliki efek dan dampak yang beragam.

Media sosial yang paling populer di Indonesia, 2020-2021.



Sumber; <https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021>

Kebebasan berbicara dan perilaku individualisme menyerang masyarakat sehingga menimbulkan kejahatan (*crime*), yang umumnya diawali dengan kebebasan berekspresi yang berlebihan serta mengesampingkan hak-hak kebebasan orang lain sehingga menimbulkan ujaran kebencian (*hate speech*) yang tidak dilakukan secara tatap muka namun membahana di ruang media sosial. Hal ini selanjutnya mengkristal menjadi kebencian kolektif sehingga munculnya komunalisme yang dapat berujung pada pengklasifikasian kelompok berdasarkan suku, etnis, agama, maupun politik dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat dari prosesi demokrasi dalam pilkada dengan ramainya peperangan yang terjadi di ruang media sosial seperti Instagram, twitter, telegram, whatsapp, facebook, TikTok dan sebagainya. Pemerintah bahkan berusaha membatasi beberapa fitur dari beberapa media sosial dengan segala fasilitasnya sebagai dampak dari menyebarnya hoax melalui media sosial sehingga memperkeruh kondisi sosial masyarakat yang ditengarai dapat berubah menjadi konflik terbuka. Dengan kemudahan akses internet terutama penggunaan Wifi secara gratis maka semakin memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menerima atau mengirimkan berita terutama jika tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap suatu informasi (hoax). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan suatu keniscayaan sehingga cara untuk menghadapinya adalah dengan menyebarkan informasi yang dapat membimbing masyarakat untuk selalu berpikiran positif dan lebih terbuka yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia yang terkandung sepenuhnya dalam nilai-nilai luhur ideologi bangsa Indonesia.

Himbauan untuk masyarakat dari divisi humas Polri terkait penyebaran hoax dan ujaran kebencian.



Sumber; https://twitter.com/divhumas_polri/status/1073262077291094017

Secara periodik, seluruh wilayah Indonesia menggelar pesta demokrasi yaitu prosesi pemilihan umum kepala daerah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi yang pada puncaknya akan dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan media sosial menjadi semakin gemar dilakukan oleh masing-masing individu maupun kelompok untuk menyebarkan visi dan misi, ide-ide dan janji-janji politiknya bahkan sekaligus sebagai ajang pencitraan diri sehingga tidak jarang ditemui adanya serangan balik terhadap suatu individu tersebut maupun suatu kelompok tertentu yang dilakukan oleh lawan politik maupun pihak-pihak yang misterius keberadaannya. Menghadapi hal tersebut maka diperlukan suatu konsep komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan organisasi yang ada guna secara dini mencegah potensi konflik sosial yang dapat terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Komunikasi sosial merupakan metode untuk memelihara serta meningkatkan silaturahmi dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila perlu disuntikkan kepada masyarakat dengan dosis yang besar dan pada waktu yang tepat sehingga terwujud kesadaran bela

negara. Dosis yang besar ini dapat diwujudkan dengan pengiriman pesan melalui SMS (Short Messaging Service) baik menggunakan jaringan seluler, maupun pesan-pesan melalui media sosial seperti Instagram, facebook, Whatsapp, telegram, Tik Tok dan lain sebagainya. Penyampaian pesan ini memerlukan kemasan yang lebih kekinian ditambah dengan paduan gambar visual yang menarik guna memudahkan masyarakat untuk mencerna, dan memahami pesan yang disampaikan sehingga pada akhirnya menjadi pembiasaan sehingga merubah kebiasaan perilaku untuk berkonflik menjadi perilaku yang saling menghargai dan toleransi yang merupakan wujud dari tingginya kesadaran bela negara dalam masyarakat.

Pesan singkat yang positif baik berupa teks, gambar, video, dan sebagainya perlu dilakukan secara terus menerus oleh lingkup organisasi pemerintah yang berurusan dengan publik yang dapat menembus seluruh lapisan masyarakat serta dapat menular ke tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan media sosial yang biasa digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pesan positif tersebut berupa teks, gambar, maupun video perlu disebar oleh organisasi pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi pembiasaan terhadap pengamalan nilai-nilai kesadaran bela negara. Apabila penyebaran teks, gambar, video yang menyebarkan pesan kesejukan dan menghindari konflik sesuai dengan nilai-nilai kesadaran bela negara dilakukan oleh berbagai pihak, tentu saja akan semakin mempermudah dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses dalam menjangkau media sosial tidak dapat dibendung lagi atau dengan kata lain fenomena ini adalah sebuah realita kekinian yang bahkan sudah menyentuh hingga mencapai akarnya. Dosis kesadaran bela negara yang tidak didapatkan secara terpadu oleh generasi kekinian perlu ditambahkan dengan mengirimkan materi-materi tambahan yang lebih kekinian berupa teks, gambar, dan video yang dapat memberikan rangsangan positif bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya pembiasaan terhadap kecenderungan berkonflik terbuka dan tidak santun melalui media sosial.

E. BELA NEGARA DALAM BERBAGAI CARA

Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran bela negara. Kesadaran akan bela negara merupakan sesuatu yang muncul dari kesadaran dan tidak dapat dipaksakan. Keinginan untuk melakukan bela negara adalah suatu niat yang tulus yang muncul dari dalam hati untuk mengabdikan dan membela bangsa dan negara dari segala macam bentuk ancaman. Ketika niat tersebut sudah muncul dan tekad sudah bulat, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mewujudkan niat tersebut dalam bentuk perbuatan. Masing-masing individu tentunya memiliki cara sendiri-sendiri dalam upaya bela negara, sesuai dengan apa yang menjadi bidangnya. Beberapa contoh diantaranya adalah bagi pelajar yang masih sekolah dapat mengikuti upacara di sekolah, patuh terhadap aturan dan guru. Bagi para atlet yang berjuang demi merah putih dalam menghadapi negara lain dalam ajang olahraga yang bersifat internasional, juga merupakan salah satu upaya bela negara.

Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata atau berperang. Banyak cara-cara lain selain mengangkat senjata yang dapat dilakukan dalam mengupayakan kesadaran bela negara. Semua hal tersebut tentunya bersumber dari diri kita. Kita dapat memulainya dengan cara yang sederhana dan lebih mudah serta dimulai dari lingkungan sekitar kita. Seperti menghormati pendapat orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, membayar pajak tepat waktu, tidak menyebarkan berita hoax dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Semua hal tersebut adalah contoh sederhana yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu. Diperlukan kesadaran dan bukan merupakan sebuah paksaan dalam hal bela negara.

F. RANGKUMAN MATERI

Berbagai macam ancaman, hambatan, serta konflik yang muncul silih berganti, memerlukan kesadaran bela negara yang hadir sebagai buah dari kesadaran dan bukan merupakan suatu paksaan. Perjuangan dari para pejuang dalam rangka upaya meraih kemerdekaan pada jaman penjajahan, dapat dijadikan bukti bahwa kesadaran bela negara telah tumbuh sejak dulu meskipun pada awalnya masih bersifat kedaerahan. Seiring dengan

berjalannya waktu, muncul lah pergerakan nasional sebagai tanda bahwa kesadaran bela negara mulai berkembang luas dan dapat lebih terorganisir. Upaya demi upaya terus dilakukan untuk menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk di masa sekarang dengan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai penyebaran informasi. Ancaman yang dapat menjadi sebuah ancaman dapat muncul dari mana saja. Ancaman tidak hanya muncul dari luar, melainkan dapat pula muncul dari dalam. Potensi-potensi konflik sering kali muncul melalui penyebaran informasi yang kurang tepat. Media sosial kerap dijadikan sarana dalam menyebarkan berita-berita yang cenderung menyesatkan. Hal ini tentunya perlu disikapi dengan bijak dan diperlukan kesadaran dari masing-masing pengguna media sosial agar terhindar dari resiko konflik, serta dapat tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa kesadaran bela negara menjadi bagian yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa?
2. Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam upaya bela negara?
3. Apakah bela negara harus selalu berarti angkat senjata/perang? Jelaskan.
4. Bagaimana peran kesadaran bela negara dalam pencegahan konflik?
5. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran bela negara melalui media sosial?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Achmad, Lc., M.A. (2021). Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah/Sekolah. Bandung. Media Sains Indonesia
- Ichsan Malik. (2017). Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Karasawa, Minoru. (2002). Patriotism, Nationalism and Internationalism among Japanese Citizens: An Etic-Emic Approach. *Political Psychology*, vol.23, no.4. 645-666
- Kartono, S.Pd dan Susi Dyah Ftmawati. (2009). Partisipasi Bela Negara. Semarang. Alprin
- Suhirwan dan kunto wibowo AP. (2020). Semangat Bela Negara Dalam Pembangunan Nasional. Makassar.Nas Media Pustaka

pengajar Sejarah dan Sosiologi pada BKB Nurul Fikri. Selain juga sebagai Tutor TWK dan TKP AKSES Education Center.

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.Ec.Dev., MA



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, Manajemen SDM, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multi disiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis yang merupakan Lulusan Program Doctor of Philosophy (Ph.D) Jurusan Business Law di salah satu Universitas Terkemuka di Malaysia juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil.



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 10 Juli 1986. Lulus sekolah menengah atas tahun 2004, kemudian melanjutkan kuliah D3 Bahasa Korea serta ekstensi S1 Bahasa Korea di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005 mendapat kesempatan mengikuti program belajar Bahasa Korea (Global Hanma 2005) yang diselenggarakan oleh Kyungnam University, di Kota Masan, Korea Selatan. Setelah lulus S1 kemudian melanjutkan studi dengan menempuh program S2 Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Semasa sekolah dan kuliah aktif dalam kegiatan sosial, musik, dan olahraga. Saat ini aktif mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta, Stikes Yogyakarta, Akademi Pariwisata Yogyakarta, dan mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing di Pusat Studi Sosial

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan ketuhanan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.